

# Desak PPNS DLH Ambil Tindakan

## Terkait Penimbunan Hutan Bakau

● Dedi Manurung

Liputan Batam

SAGULUNG (HK) — Camat Sagulung, Reza Khadafi meminta pihak PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam supaya segera mengambil tindakan, terkait dengan aktivitas penimbunan hutan bakau yang terjadi di wilayah kerjanya.

"Kami berharap PPNS agar segera turun dan cek. Kalau punya izin ditunjukkan dulu, tapi kalau belum ada izin harus diambil tindakan penghentian. Sebelum berdampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya," ujar Reza Rabu (7/3).

Reza juga mengaku

sudah melihat langsung aktivitas proyek reklamasi itu dan memang akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Apalagi jika proyek tersebut juga menutup ataupun mempersempit sungai ataupun saluran drainase yang ada.

**Desak PPNS ... Hal. 10**



KEPALA BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo memberikan sambutan di 100 hari kinerja pimpinan BP Batam.

## Penghapusan UWTO di Preside

"Kita sudah turun kelapangan untuk ngecek bersama pihak kelurahan dan memang harus segera ditindak lanjuti. Karena itu lokasi resapan air. Apalagi wilayah Sagulung rawan banjir," ujar Reza saat dikonfirmasi.

Lanjutnya lagi, pihak proyek sendiri belum ada tanggapan apapun terkait persoalan itu. Bahkan sudah dipanggil, namun pihak proyek tidak kooperatif menghadiri panggilan.

"Ini akan kami awasi terus. Kami berharap pihak DLH segera turun. Kalau tak punya izin segel. Tak ada cerita lain," tegas Reza.

Proyek reklamasi yang

menimbun hutan bakau di belakang Kavling Melati dan Kavling Kamboja, Kelurahan Sei Pelenggut, Sagulung ditanggapi serius oleh pihak kecamatan Sagulung.

"Sudah banyak yang kita hentikan. Ini tidak main-main. Kalau banjir di Sagulung yang disalahkan pemerintah padahal penyebabnya kegiatan-kegiatan seperti ini (penimbunan bakau, red)," tegasnya lagi.

Warga yang berdiam di sekitar lokasi reklamasi mengaku tak setuju dengan aktivitas proyek tersebut sebab akan berdampak buruk bagi lingkungan

tempat tinggal mereka.

"Kalau itu ditimbun semua, tak ada lagi daerah resapan air. Bisa-bisa tenggelam rumah-rumah kami yang ada di sekitar sini," ujar Lestari, warga Kavling Bukit Melati.

Maka dari itu, seluruh warga disana menolak keberadaan proyek reklamasi itu. Kecuali ada jaminan kalau proyek tersebut tidak berdampak buruk bagi lingkungan mereka. Karenanya, mereka meminta instansi pemerintah terkait segera turun ke lokasi dan mempertanyakan legalitas perizinan proyek itu. \*\*\*